

PENGARUH INFLASI, UPAH MINIMUM PROVINSI, BELANJA MODAL, DAN PENGANGGURAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI INDONESIA

Annisa Abdullah¹

Hasbiullah²

Email: nisbul0202@gmail.com

^{1,2}Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

This study discusses the effect of inflation, minimum wages, capital expenditures and unemployment on gross regional domestic product in Indonesia. This study aims to determine the effect of inflation, minimum wage, capital expenditure, and unemployment on Gross Domestic Product in Indonesia in 2019-2021.

This research was conducted in 34 provinces in Indonesia using secondary data obtained from the Indonesian Central Bureau of Statistics from 2019 to 2021. The quantitative research using the panel data regression method, and the model chosen is the fixed effect model using Eviews Software.

The results reflect that inflation have significant negative effect on gross regional domestic product. The minimum wage has a significant positive effect on gross regional domestic product. While capital expenditure has no significant positive effect on gross regional domestic product. Moreover, unemployment rate has a significant negative effect on gross regional domestic product.

Keywords: *Inflation, Minimum Wage, Capital Expenditures, Unemployment, Gross Regional Domestic Product*

ARTICLE INFO

Received: 5 Maret 2023

Accepted 9 Mei 2023

Online 15 Mei 2023

*Correspondence: Annisa Abdullah

E-mail: nisbul0202@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pengaruh inflasi, upah minimum, belanja modal dan pengangguran terhadap produk domestik regional bruto di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, mengetahui pengaruh upah minimum terhadap produk domestik regional bruto, mengetahui belanja modal terhadap produk domestik regional bruto dan mengetahui pengaruh pengangguran terhadap produk domestik regional bruto di Indonesia pada tahun 2019-2021.

Penelitian ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Periode penelitian ini adalah 3 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi data panel dan model yang terpilih adalah *fixed effect model* dengan menggunakan bantuan software Eviews.

Hasilnya menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto dan pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap produk domestik regional bruto.

Kata Kunci: *Inflasi, Upah Minimum, Belanja Modal, Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto*

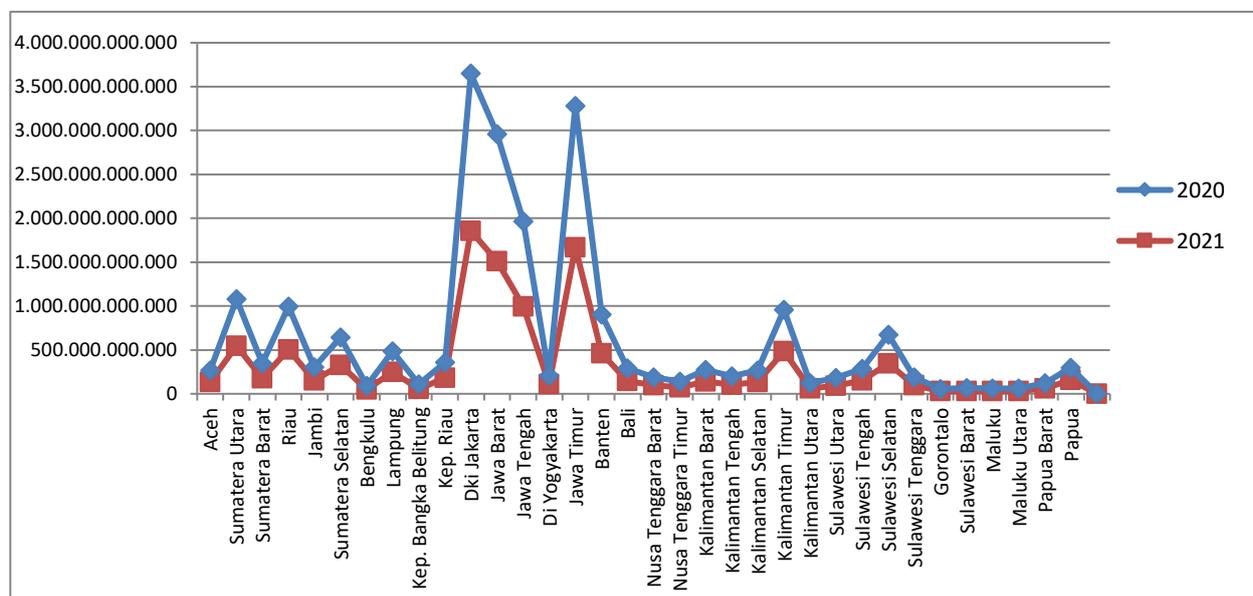
PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat menunjang perekonomian baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga dalam perdagangan internasional negara Indonesia

salah satu perhatian negara-negara lain yang dianggap memiliki perekonomian yang baik di masa depan dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Indonesia dapat dikatakan sedang di fase maju dan berubah menjadi negara yang lebih sejahtera apabila pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun bertumbuh positif. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia dari tahun sebelumnya membuat pemerintah khawatir jika Indonesia mengalami depresi maupun resesi. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021, di mana Indonesia mengalami resesi dan keterbatasa aktivitas perekonomian yang disebabkan Pandemi Covid-19. Berakibat pada peningkatan pengangguran, merosotnya taraf kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Pratiwi et al., 2020).

Permasalahan yang dihadapi Indonesia terkait pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan dalam jangka panjang sebab sangat dipengaruhi oleh inflasi, upah, belanja modal, dan pengangguran. Indonesia pertumbuhan ekonomi di setiap daerahnya merupakan tujuan akhir, sebab pembangunan daerah yang berkembang akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang juga menjadi tolak ukur keberhasilan ekonomi jangka panjang Indonesia (Luthfi & Agustin, 2021).

Gambar 1 PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2021 (Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, (2022)

Gambar 1 menjelaskan terjadinya perubahan kenaikan Produk Domestik Bruto Indonesia sejak tahun 2020-2021, pada tahun 2020 Produk Domestik Bruto mengalami penurunan, yakni sebesar Rp 226.595.1 miliar. Hal ini disebabkan pada tahun yang bersangkutan terjadi wabah Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian di seluruh negara termasuk Indonesia merosot. pada tahun 2020 hingga 2021 PDB mengalami peningkatan sebesar Rp 396.425.3 miliar. Hal ini disebabkan dengan membaiknya mobilitas penduduk yang mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi meningkat (BPS, 2022). Tabel 1.1 juga menjelaskan perkembangan PDRB berdasarkan provinsi dengan tingkat PDRB tertinggi di Indonesia, provinsi dengan nilai PDRB tertinggi ialah provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 1.856.301 miliar rupiah. di susul oleh Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 1.669.117 miliar rupiah. Selanjutnya Jawa Barat sebesar Rp.1.507.746 miliar rupiah. Perkembangan PDRB di

setiap daerah juga mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat Covid-19 yang berimbas pada perekonomian nasional terjadinya penurunan.

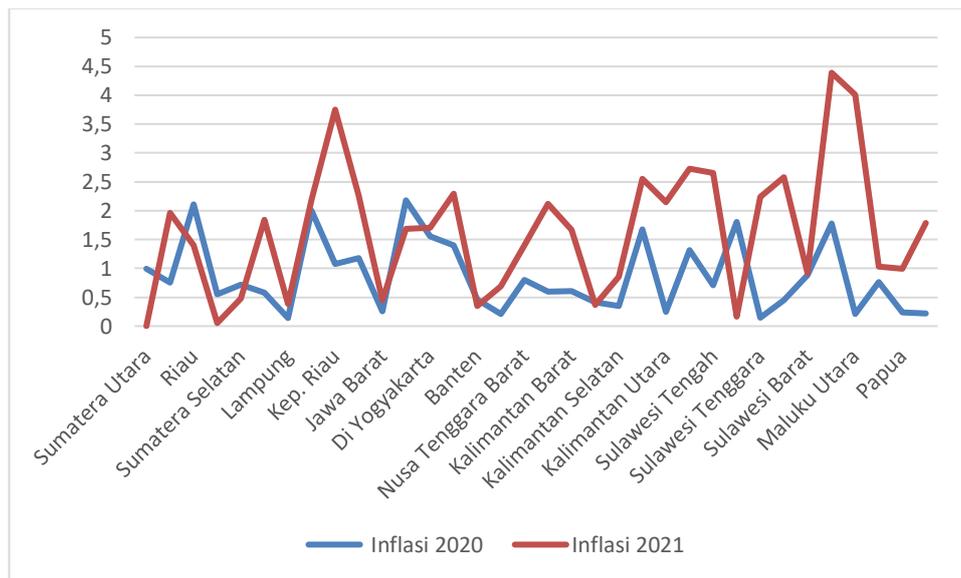
Perkembangan perekonomian suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Dampak inflasi akan memperlambat kemajuan perekonomian (Sukirno, 2015). Lebih lanjut, Indonesia mengatakan inflasi yang tidak stabil akan mengganggu stabilitas pengambilan keputusan agen ekonomi yang memperlambat pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 2022).

Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga baik secara umum maupun terus-menerus (Sukirno, 2015). Harga pasar dapat dilihat melalui tinggi rendahnya inflasi, apabila harga pasar tinggi maka inflasinya tinggi, begitupun sebaliknya apabila harga pasar sedang stabil menunjukkan tingkat inflasi yang rendah. Inflasi adalah kenaikan persentase tahunan pada tingkatan harga umum yang diukur melalui indeks harga konsumen. Hal itu memberikan kesimpulan apabila kenaikan suatu barang hanya satu barang saja maka hal ini tidak dapat didefinisikan sebagai inflasi, namun ketika harga barang dan jasa juga terjadi kenaikan maka hal ini dapat diartikan sebagai inflasi.

Sukirno (2015) mengemukakan tujuan jangka panjang pemerintah ialah menjaga tingkat inflasi yang dapat mencapai tingkat rendah. Tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan berbagai dampak buruk yaitu berkurangnya produktif investasi, menurunnya tingkat kegiatan ekonomi, bertambahnya jumlah pengangguran, produk negara yang tidak dapat berkompetisi di pasar Internasional, menurunnya jumlah ekspor dan meningkatnya jumlah impor serta memburuknya kedudukan neraca pembayaran. Apabila inflasi tidak ditangani dengan baik maka dapat memengaruhi kemampuan ekonomi pada suatu negara, hal itu juga memengaruhi pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pratiwi et al. (2020) dan Ratnasari (2019) memperlihatkan inflasi berpengaruh negatif terhadap PDB. Sukirno (2015) mengemukakan bahwa inflasi yang tinggi akan menurunkan kemajuan ekonomi. Dampak dari biaya hidup yang terus meningkat menyebabkan berbagai aktivitas masyarakat tidak menguntungkan. Hal tersebut mengakibatkan terguncangnya perekonomian pada suatu negara yang mengakibatkan bentuk penerimaan suatu negara. Berbanding terbalik dengan riset yang dilakukan oleh Daniel (2019) yang memperlihatkan hasil bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB.

Berdasarkan data dari BPS (Gambar 2), memperlihatkan perubahan tingkat inflasi di Indonesia sejak dua tahun terakhir. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu 1,8% hal ini disebabkan adanya kenaikan tarif listrik. Tahun 2021 menjadi tahun dengan tingkat inflasi terendah sejak lima tahun terakhir, ini diakibatkan adanya wabah Covid-19 yang membuat pembatasan interaksi langsung masyarakat sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal ini terjadi juga dengan beberapa kota yang tersebar di Indonesia, misalnya di Sulawesi Selatan tingkat inflasi pada tahun 2020 sebesar 0,15% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,05%. Kemudian untuk provinsi DKI Jakarta tingkat inflasi pada tahun 2020 sebesar 1,59% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,64%. Namun, DKI Jakarta masih memegang sebagai provinsi dengan tingkat inflasi yang tertinggi di Indonesia, disusul oleh Jawa Barat sebesar 1,71%.

Gambar 2 Inflasi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2022)

Penetapan upah minimum ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup masyarakat, kemampuan perusahaan untuk berkembang dan bertahan, keadaan pasar tenaga kerja, indeks harga konsumen, tingkat upah minimum antardaerah, perkembangan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah menganalisis serta menetapkan nominal upah minimum pada tiap wilayah, ketika pemerintah ingin menaikkan nominal upah minimum pada wilayah tertentu. Namun jika pemerintah tidak mempertimbangkan beberapa ketentuan yang telah disebutkan maka dapat mengakibatkan roda perekonomian yang terganggu dan terhambat serta dapat menimbulkan tidak seimbangnya perekonomian akibat naiknya tingkat upah pada wilayah tersebut. Oleh sebab itu, apabila kenaikan upah minimum kurang tepat maka akan memengaruhi tingkat produksi, konsumsi serta distribusi (Hutagalung & Santosa, 2019).

Upah minimum memiliki peranan penting terhadap kaum muda yang ingin bekerja dalam pasar tenaga kerja. Keseimbangan pada upah minimum bagi kaum muda relatif rendah, hal itu disebabkan oleh kurangnya keahlian serta pengalaman yang dimiliki. Upah minimum sangat berdampak pada seberapa banyak keahlian dan pengalaman pekerja, namun hal tersebut tidak memengaruhi tenaga kerja yang ada, hal ini disebabkan oleh upah keseimbangan yang berada di atas upah minimum (Mankiw, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Romi (2021) dan Luthfi & Agustin (2021) memperlihatkan hasil bahwa upah minimum memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu elemen penting untuk memastikan masyarakat memiliki kehidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki kualitas hidup yang baik maka dibuktikan dengan upah minimum regional. Jika ekonomi berjalan dengan baik, maka kemungkinan ada peningkatan jumlah pekerja yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi.

Todaro (2006) mengidentifikasi tiga penggerak utama dalam kemajuan ekonomi. Pertama, akumulasi modal mencakup serangkaian investasi baru yang dilakukan aset berwujud, dan sumber daya manusia. Kedua adalah penambahan penduduk, yang meningkatkan angkatan kerja. Ketiga, perkembangan teknologi. Aset yang diperoleh melalui belanja modal ialah

syarat utama bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Pemerintah daerah mengalokasikan kas sebagai APBD dalam hal penambahan aset tetap.

Setiap daerah diberikan hak untuk mengelola keuangannya sendiri yang tertuang di dalam UU terkait dengan otonomi daerah. Begitu pula dengan pengelolaan terkait belanja modal yang tertuang dalam APBD setiap daerah dan belanja modal memiliki pengaruh dalam pembentukan kegiatan ekonomi di setiap daerah. Oleh karena itu, belanja modal memainkan peranan yang krusial dalam kegiatan ekonomi daerah. Belanja modal yang terjadi di setiap daerah memiliki nilai yang berbeda-beda dari sumber keuangan daerah yang memiliki nilai yang berbeda juga.

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya diikuti dengan adanya lapangan pekerjaan yang baru. Saat perekonomian berkembang, artinya produksi produk-produk ekonomi ikut mengalami pertumbuhan. Apabila hal tersebut terjadi, maka keperluan akan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu komoditi pun ikut bertambah. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran mempunyai keterkaitan yang kuat karena masyarakat yang bekerja dapat menghasilkan produk, sedangkan pengangguran tidak memberikan peran dalam peningkatan produksi (Salvatore, 2013).

Todaro (2006) menyatakan apabila terdapat peningkatan produksi pada pertumbuhan ekonomi maka pemerintah diharapkan dapat menambah lapangan kerja yang tersedia, maka dapat mengurangi jumlah pengangguran. Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi ialah terciptanya lapangan kerja yang baru. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka produksi barang dan jasa juga ikut mengalami kenaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrezi (2018) memperlihatkan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dapat diterangkan dengan menggunakan hukum okun. Arthur Okun menyatakan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, yang artinya ketika tingkat pengangguran semakin tinggi sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin menurun.

Dainty et al. (2020) menunjukkan pengangguran memberikan pengaruh negatif pada PDRB. Ini berarti kenaikan PDRB berdampak pada penyerapan tenaga kerja yakni tingkat pengangguran akan berkurang, begitu pun sebaliknya. Hukum Okun yang mengidentifikasi pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran sebagai hubungan yang negatif. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Rahmawati (2021) menunjukkan hasil berbeda pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah Indonesia masih menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti.

DATA DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni suatu metode dengan memakai data yang dikumpulkan secara terstruktur dan melihat kausalitas antarvariabel penelitian dengan hipotesis yang sudah direncanakan sebelumnya (Mustopa, 2020). Penelitian melihat indikator yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2019-2021. Jenis data yang dipakai pada riset ini ialah data sekunder dengan jenis data panel yaitu paduan antara data *time series* dan data *cross section* menjadi satu data yang utuh

pada 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2021 berupa inflasi, upah, belanja modal, dan pengangguran yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Fungsi model ekonomi dari variabel penelitian ini, sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \dots \dots \dots (1)$$

Bentuk persamaan variable-variable dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Model pada persamaan 1 kemudian ditransformasi ke bentuk linear dengan memakai logaritma natural (Ln) ke dalam model sehingga diperoleh persamaan berikut ini:

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan: Y_{it} adalah Pertumbuhan Ekonomi; β_0 adalah Konstanta; $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ adalah koefisien regresi variabel bebas; X_1 adalah Inflasi; X_2 adalah Upah, X_3 adalah Belanja Modal; X_4 adalah Pengangguran; ε adalah *Error term*; I adalah Provinsi; t adalah Tahun.

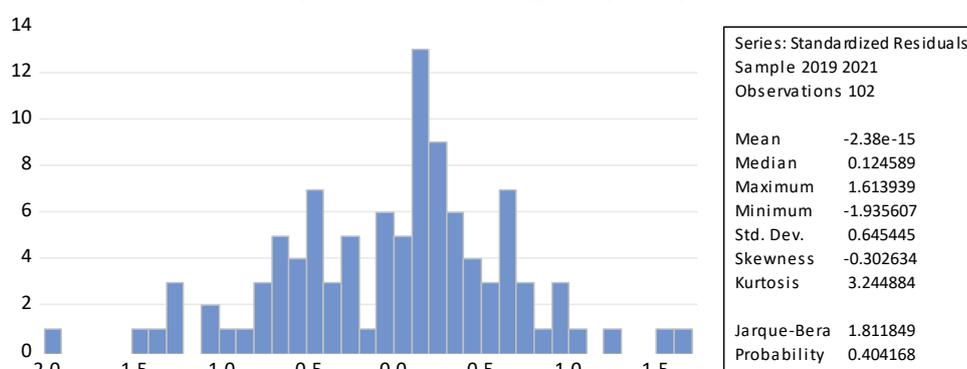
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pemeriksaan uji normalitas bermaksud untuk melihat mengenai variabel bebas, dan variabel terikat, atau masing-masing variable mempunyai distribusi yang teratur atau tidak. Gambar 3 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari statistik J-B yakni 0.4041168. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas yakni 0.404168, lebih tinggi disandingkan tingkat signifikansi yakni 0,05. Hal ini menandakan asumsi normalitas terpenuhi.

Gambar 3 Uji Normalitas dengan Uji Jerque-Bera (J-B)



Sumber: Hasil pengolahan *Eviews 12* (2022)

Uji Multikolinearitas

Tabel 1 Uji Multikolinieritas dengan Matriks Korelasi

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	-0.078661	-0.160522	-0.029811
X2	-0.078661	1.000000	-0.034655	0.246484
X3	-0.160522	-0.034655	1.000000	0.262186
X4	-0.029811	0.246484	0.262186	1.000000

Sumber: Hasil Pengolahan *Eviews 12* (2022)

Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian multikolinieritas bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antarvariabel bebas. Hal ini memperlihatkan nilai korelasi antarvariabel bebas tidak melewati dari 0,8.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan nilai probability pada probablity Chi square variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05.

Tabel 2 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Harvey

Heteroskedasticity Test: Harvey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.192107	Prob. F(4,165)	0.0721
Obs*R-squared	8.578273	Prob. Chi-Square(4)	0.0725
Scaled explained SS	6.997734	Prob. Chi-Square(4)	0.1360

Sumber: Hasil Pengolahan *Eviews 12* (2022)

Uji Autokorelasi

Tabel 3 nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 2.634003 maka nilai statistik Durbin-Watson di antara 1 dan 3, yakni $1 < 2.634003 < 3$, sehingga asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual.

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

R-squared	0.999516	Mean dependent var	323904.4
Adjusted R-squared	0.999236	S.D. dependent var	461328.6
S.E. of regression	12750.31	Akaike info criterion	22.02351
Sum squared resid	1.04E+10	Schwarz criterion	23.00144
Log likelihood	-1085.199	Hannan-Quinn criter.	22.41950
F-statistic	3571.816	Durbin-Watson stat	2.634003
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan *Eviews 12* (2022)

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Tabel 4 Hasil Uji *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	302799.5	28760.19	10.52843	0.0000
X1	-7547.618	3731.118	-2.022884	0.0473
X2	0.026943	0.012184	2.211223	0.0306
X3	181.6331	1692.185	0.107336	0.9149
X4	-8169.614	2073.934	-3.939187	0.0002

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.999516	Mean dependent var	323904.4
Adjusted R-squared	0.999236	S.D. dependent var	461328.6
S.E. of regression	12750.31	Akaike info criterion	22.02351
Sum squared resid	1.04E+10	Schwarz criterion	23.00144
Log likelihood	-1085.199	Hannan-Quinn criter.	22.41950
F-statistic	3571.816	Durbin-Watson stat	2.634003
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan *Eviews 12* (2022)

Persamaan regresi panel yang dipakai pada riset ini yakni:

$$\begin{aligned} \ln Y_{it} = & -302,799,5 - 7547,618 X_{1it} + 0,026943 X_{2it} + 181,6331 X_{3it} \\ & - 8169.614 X_{4it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

PEMBAHASAN

Pengaruh Inflasi terhadap PDRB

Hasil analisis regresi memperlihatkan pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan $0,0473 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $-7547,616$ yang artinya inflasi berpengaruh negatif dan signifikan pada PDRB di provinsi di Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Hal ini menandakan semakin tinggi inflasi maka PDRB akan menurun begitupun sebaliknya, hal ini sejalan dengan hipotesis peneliti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian Pratiwi et al. (2020) dan Ratnasari (2019) memperlihatkan inflasi berpengaruh negatif pada Produk Domestik Bruto (PDB). Sukirno (2015) mengemukakan bahwa Kemajuan ekonomi akan diperlambat oleh inflasi yang tinggi. Sejumlah aktivitas masyarakat tidak lagi menguntungkan akibat kenaikan biaya hidup. Hal ini menyebabkan kejutan bagi perekonomian suatu negara dan sebagai hasilnya menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniel (2019) yang memperlihatkan hasil inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Upah terhadap PDRB

Hasil analisis regresi memperlihatkan pengaruh upah pada pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan $0,0306 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.026943 yang berarti upah berpengaruh positif dan signifikan atas PDRB di Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Hal ini menerangkan bahwa semakin tinggi tingkat upah maka PDRB semakin tinggi begitupun sebaliknya.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Askenazy (2003), Romi (2021) dan Luthfi & Agustin (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan modal manusia didorong oleh upah minimum, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika posisi

meningkatnya upah minimum regional harus di seimbangkan dengan kenaikan proses hasil produksi terhadap peningkatan produktivitas pekerja, maka pengaruh upah minimum terhadap kesejahteraan akan menjadi nyata (Tambunan, 2016).

Pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB

Hasil analisis regresi memperlihatkan pengaruh belanja modal pada PDRB mempunyai nilai signifikan $0,9149 > 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 181.6331 yang artinya belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan atas PDRB di masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Hal ini memperlihatkan tingginya atau rendahnya belanja modal maka tidak akan memberikan dampak terhadap PDRB.

Hal ini sejalan dengan data yang telah dijelaskan bahwa meski menuju ke arah yang baik, belanja modal berdampak kecil terhadap PDRB. Hal itu berarti kenyataan belanja modal yang dianggarkan dan dilaksanakan tidak dapat secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, karena belanja modal membutuhkan proses yang panjang mulai dari penganggaran dan diakhiri dengan pelaksanaannya, maka belanja modal tersebut hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendorong perekonomian.

Pengaruh Pengangguran terhadap PDRB

Hasil analisis regresi memperlihatkan pengaruh pengangguran pada PDRB mempunyai nilai signifikan $0,0002 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar -8169.614 yang artinya pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan atas PDRB di masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Hal ini memperlihatkan tingginya pengangguran maka PDRB semakin menurun begitu pula sebaliknya. Hal ini sejalan dengan data yang ada bahwa pengangguran rata-rata di daerah Indonesia mengalami penurunan sedangkan PDRB mengalami peningkatan di beberapa daerah Indonesia. Ini menandakan bahwa banyaknya tenaga kerja yang dapat memproduksi lebih banyak sehingga PDRB turut meningkat.

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Barro, 2000; Harjunawati & Hendarsih, 2020), Arizal & Marwan (2019) dan Hidayat (2020) yang memperlihatkan hasil pengaruh pengangguran negatif dan signifikan terhadap PDB. Dengan kata lain, meningkatnya pengangguran akan menurunkan PDB begitupun sebaliknya, menurunnya pengangguran akan mendorong PDB yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang bisa dilakukan dengan dapat disimpulkan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia. Hal itu diakibatkan kenaikan harga yang cenderung mahal bagi semua orang dapat mengalami inflasi. Orang harus membelanjakan lebih banyak uang untuk membeli barang yang diinginkan ketika terjadi inflasi. Kemudian, upah minimum berpengaruh pada PDRB di Indonesia. Hal ini peningkatan gaji sejalan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja karena tenaga kerja yang produktif akan menghasilkan lebih banyak barang dan lebih banyak mendapatkan uang dan berdampak pada kesehatan ekonomi. Selanjutnya, belanja modal tidak berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia. Ini dikarenakan belanja modal yang dianggarkan dan dilaksanakan tidak bisa secara langsung mempengaruhi PDRB karena memerlukan waktu untuk menyelesaikan prosesnya, mulai dari penganggaran dan diakhiri dengan implementasi. Serta tingkat pengangguran berpengaruh

terhadap PDRB di Indonesia. Hal ini diakibatkan fakta bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, ketika modalnya masih langka dan teknologi masih primitif sehingga kepadatan penduduk tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan kerja.

REFERENSI

- Afrianti, R. (2019). *Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera. Skripsi*, 1–105.
- Ahmad, M. A. (1984). *Tafsir Al-Maraghi*. CV Toha Putr.
- Akbar, A. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Human Development Index dan Penanaman Modal Asing terhadap Kemiskinan di 5 Negara ASEAN. Skripsi*, 1–96.
- Ali Mustopa. (2020). *Nilai Tukar (Kurs), Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Zakat Infaq Sedekah (ZIS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.
- Alridho, m. satrio. (2018). *analisis pengaruh produk domestik bruto, inflasi dan upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran di indonesia periode 2002-2016*. 1–148.
- Arizal, M., & Marwan, M. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 2(3), 433. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i3.7414>
- Askenazy, P. (2003). Minimum Wage, Export, and Growth. *European Economic Review*.
- Asyhadie, Z. (2007). *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Aulya, V. (2016). *pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten atau kota provinsi jawa tengah periode 2007-2013*.
- Badan Busat Statistik. (2016). *Publikasi BPS*.
- Bank Indonesia. (2021). *Publikasi Bank Indonesia*.
- Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries* Robert J. Barro, Harvard University June 1999. *Harvard University*, 5(June), 2–48.
- BPS. (2021). *Perekonomian Indonesia*.
- Cahyani, N. (2016). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, inflasi, dan investasi terhadap jumlah pengangguran di diy tahun 1986-2015 skripsi*.
- Dainty, G., Roring, J., Kumenaung, A. G., Lopian, A. L. C. P., & Ratulangi, U. S. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) 4 Kota Di Provinsi Sulawesi Utara*. 20(4), 70–87.
- Daniel, P. A. (2019). Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 2(1), 131. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.37>

- Easterly, W., & Rebelo, S. (1993). Fiscal Policy and Economic Growth: an Empirical Investigation. In *Journal of Monetary Economics* (Vol. 32, Issue 3, pp. 417–458).
- Fahrezi, R. A. (2018). *Analisis Pengangguran Di Indonesia Tahun 2001-2017*.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.
- Ferry, P. (2019). Modul Ekonomi Publik, Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Gilarso. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Kanisius.
- hakim, M. A. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Angkatan Kerja, Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pdrb Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2010-2019. 2005–2003, 8.5.2017, $\gamma\alpha\rho\eta$.
- Harjunawati, S., & Hendarsih, I. (2020). Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2009-2019. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 7(2), 13–24. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v7i2.27>
- Harvie, C. (2006). *The Interplay Between the Thai And Several Other International Stock Markets. February*.
- Hidayat, A. N. (2020). : Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007 – 2017. *SELL Journal*, 5(1), 55.
- Hutagalung, P. S. P., & Santosa, P. B. (2013). Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Inflasi Sedang Di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 2, 1–12.
- Idris, A. (2016). *Ekonomi Publik*. CV. Budi Utama.
- Indradewa, I., & Natha, K. (2015). Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(8), 923–950.
- Istiyani, D. (2020). *Aplikasi Data Panel pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2013-2019. Skripsi*, 1–98.
- Luthfi, A., & Erla Shernik Agustin, J. (2021). *Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi (Ump) Dan Nilai Tukar Petani (Ntp) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi*. 4(1), 1–23.
- Mangkoesebroto, G. (2001). *Ekonomi Pubilk*. FE UGM.
- Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Ketiga*. Salemba Empat.
- Martina Paskalia. (2021). *Pengaruh Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 1998-2018*.
- Masubat, M. P. (2021). *Pengaruh Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1998-2018. Skripsi*, 1–93.
- Muhammad Haiqal. (2020). *Pengaruh Investasi Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh*.

Musgrave, R. (1959). *The Theory of Public Finance*. Mc GrawHill.

Ningsih, fatmi ratna. (2010). *pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di indonesia periode tahun 1988-2008*.